



IMPLEMENTASI KERJASAMA INDONESIA DENGAN AS DALAM PENANGANAN AKSI TERORISME DI INDONESIA

Cesarani Rilistya

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro
Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269
Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

In 2002, Indonesia was shocked by bomb explosion in Bali which caused more than 200 casualties. Indonesian Government started to be aware with the lethal danger of terrorism, establishing Government Regulations in Lieu of Law No. 1 Year 2002 on Combating Criminal Acts of Terrorism (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme) and establishing Counter-Terrorism Coordinating Desk (DKPT) which is now BNPT (Badan Nasional Pemberantasan Terorisme). The Bali Bombing case also received the United States's attention and so they offered Indonesia cooperation in combating terrorism. The cooperation between Indonesia and the United States is actualized with the implementation of counter terrorism. This research will explain the process of the implementation of Indonesia-United States cooperation on counter terrorism in Indonesia. On the process of the cooperation, there are supporting and inhibiting factors that affect the consummation of Indonesia-United States cooperation on counter terrorism. This research uses qualitative method with explanative analysis. The research shows that the cooperation between Indonesia-United States helps Indonesia preventing terrorism acts. The prevention form on terrorism mostly done by the Special Detachment 88 (Densus 88), which successfully combat the terrorists and raid the terrorists's quarters. The reliable investigation and raid skills came from United States' training provided by the FBI to the best Indonesian police forces.

Keywords: *terrorism, the implementation of cooperation, Indonesia, United States, counter terrorism*

1. Pendahuluan

Terorisme merupakan suatu tindakan yang bersifat mengancam yang dapat mengganggu kesejahteraan hidup manusia. Dewasa ini aksi terorisme semakin banyak terjadi di seluruh dunia dan menyerang orang-orang yang tidak bersalah. Aksi terorisme yang dilakukan suatu kelompok dapat memiliki pengaruh eksplisit tidak hanya pada suatu

negara di mana teroris melakukan aksinya, namun dapat mengancam negara lain. Selain itu, suatu kelompok teroris dapat melakukan aksinya di beberapa negara yang dikontrol di satu pusat. Tindakan terorisme tersebut menjadi salah satu bentuk dari *transnational organized crime*.

Amerika Serikat (AS) mengalami peristiwa terorisme yang menjadi ujung tombak kampanye AS dalam melawan terorisme. Peristiwa 9/11 di AS, yang merupakan aksi teroris al Qaeda yang melakukan pembajakan pesawat jet dan menabrakkannya pada gedung World Trade Center di Washington DC, 11 September 2001, adalah saat dimana AS mulai lebih sadar terhadap isu keamanan nasionalnya.

Pemerintah AS pun mulai melakukan langkah besar untuk keamanan nasionalnya; pengamanan ketat di bandara, perbatasan negara dan mulai mencari sekutu untuk bersamasama memberantas terorisme. Dalam rilisan resmi U.S Department of State, *Patterns of Global Terrorism*, Bush menetapkan empat kebijakan abadi dalam *counterterrorism*; (1) tidak ada konsesi untuk teroris dan tidak masalah untuk menyerang; (2) membawa teroris ke pengadilan atas kejahatan mereka; (3) mengisolasi dan menerapkan tekanan pada negara-negara yang mensponsori terorisme untuk memaksa mereka untuk mengubah perilaku mereka; (4) meningkatkan kemampuan kontrateroris dari negara-negara yang bekerja sama dengan AS dan yang memerlukan bantuan (U.S Department of State, 2004:ix).

Tragedi bom Bali tahun 2002 merupakan titik balik bagi Indonesia untuk benar-benar peduli pada terorisme di Indonesia. Peledakan bom di Bali, 12 Oktober 2002 seolah-olah menjadi peringatan bagi Megawati dan pemerintah Indonesia, untuk segera mengatasi terorisme di Indonesia, terutama kelompok-kelompok radikal seperti Jemaah Islamiyah yang sudah lama ada di Indonesia. Dari sekian banyak peristiwa peledakan bom di Indonesia di masa lalu sejak tahun 1960an, bom Bali ini merupakan peristiwa terbesar dengan ratusan korban jiwa.

Salah satu negara yang diajak bekerjasama oleh AS untuk berkampanye anti terorisme adalah Indonesia, dengan pertimbangan Indonesia sebagai negara demokrasi dengan mayoritas pemeluk Islam terbesar, banyaknya peristiwa terorisme, yang terutama sebagian besar pelaku teroris adalah kelompok radikal Islam (<http://www.gpo.gov/>). Adanya kesamaan permasalahan terorisme antara Indonesia dan AS dan dipandang bahwa masalah terorisme ini adalah masalah lintas negara, sehingga kedua negara bersepakat untuk bekerjasama dalam kontraterorisme.

Untuk menganalisis kerjasama Indonesia dengan AS dalam penanganan aksi terorisme di Indonesia, menggunakan perspektif Liberalisme yang berfokus pada kebebasan, kerjasama, perdamaian dan kemajuan. Terorisme merupakan kejahatan transnasional yang memerlukan kerjasama internasional untuk mengatasinya, dan bentuk dari kerjasama tersebut dilaksanakan dengan adanya implementasi kerjasama.

2. Pembahasan

Implementasi kerjasama dalam menangani aksi terorisme diterapkan dalam melaksanakan *job desk* pada program-program yang sudah dibentuk, yaitu Anti Terrorism Assistance (ATA) Program melalui Bureau of Diplomatic Security AS untuk Densus 88 Anti Teror Polri, dan Regional Defense Combating Terrorism Fellowship Program (CTFP) melalui Department of Defense (DoD) untuk TNI.

Anti-Terrorism Assistance (ATA) Program dalam Densus 88

Densus 88 memiliki peran yang besar pada kontra terorisme di Indonesia. Kemampuan Densus 88 ini berasal dari potensi polisi Indonesia yang secara khusus dilatih oleh FBI. AS mendanai pelatihan-pelatihan untuk pasukan khusus ini melalui program Anti-Terrorism Assistance (ATA). Dibentuk setelah bom Bali I, tidak lama setelah pembentukannya, Densus 88 mulai bekerja dan membuktikan kemampuannya dalam kontra terorisme.

Paska bom Bali merupakan tahun-tahun tersibuk bagi Densus 88 yang baru dibentuk pada bulan April 2003. Kemampuan Densus 88 sudah terlihat hanya dua bulan setelah pembentukannya, menghadapi tugas pertama yaitu menyelidiki peledakan bom di Hotel JW Marriott, 5 Agustus 2003. Pada peristiwa itu, hanya dalam beberapa minggu Densus 88 mampu menangkap jaringan pengebom. Pada peledakan bom selanjutnya yaitu bom Kuningan, Densus 88 mampu membongkar kasus tersebut dan segera menangkap para pelaku. Tiga tahun setelah bom Bali 2002 kembali terjadi peledakan bom Bali pada 1 Oktober 2005, walaupun korban tak sebanyak bom Bali I. Densus 88 mampu menyelesaikan kasus tersebut dalam tiga bulan (Muradi, 2012:40).

Kehandalan Densus 88 menjadi semakin terkemuka ketika mampu menangkap gembong teroris paling dicari yang menjadi otak di balik peristiwa-peristiwa peledakan bom di Indonesia, Dr Azahari. Namun karena terjadi baku tembak antara Densus 88 dan kelompok Dr Azahari, Dr Azahari dan dua rekannya bunuh diri karena diduga panik lalu meledakkan diri (<http://www.suaramerdeka.com/>, 10 November 2005).

Densus 88 kembali berprestasi atas keberhasilannya dalam membongkar jaringan teroris yang menyimpan senjata dan bom terbesar, di Sleman, Yogyakarta, 20 Maret 2007. Ditemukan sejumlah amunisi dan senjata di bunker di rumah seorang petani bernama Sikas, jenis amunisi dan senjata yang ditemukan itu adalah 2.009 butir peluru untuk senapan serbu jenis AK, 20 kg Tri Nitro Toluena (TNT), potassium chlorate 30 karung dan 2 jerigen dengan berat total 625 kg, detonator aktif 200 buah, 1 senjata laras panjang rakitan, 1 revolver rakitan, sebuah senjata api AR organik, *magazine* untuk senjata M16 dan SS1, dan puluhan butir peluru. Anggota tim juga menyita 16 buah bom lontar dan 1 golok sepanjang 30 cm. Tersangka juga merupakan anak buah Noordin M Top (<http://www.suaramerdeka.com/>, 22 Maret 2007).

Abu Dujana, teroris yang dianggap lebih berbahaya dibanding Noordin M Top, berhasil ditangkap oleh Densus 88 pada bulan Juni 2007 (<http://nasional.tempo.co/>, 9 Maret 2013). Abu Dujana adalah komandan militer Jemaah Islamiyah, teroris di balik peledakan bom Bali I, hotel JW Marriott dan Kedubes Australia. Abu Dujana memiliki koneksi langsung dan dilatih oleh Osama bin Laden (<http://edition.cnn.com/>, 26 Juni 2007). Selanjutnya Densus 88 juga berhasil menangkap amir (pemimpin) JI, yaitu Zarkasih. Zarkasih mengatur dan mengontrol semua tindakan terorisme. Penangkapan kedua teroris tersebut disebut sebagai penangkapan terbesar oleh Densus 88 (<http://www.nytimes.com/>, 15 Juni 2007). Prestasi Densus 88 tersebut dianggap sebagai prestasi yang melambungkan nama Densus 88 Polri dan dapat dibuktikan bahwa Indonesia memiliki kesatuan anti teror yang handal dan profesional (Muradi, 2012:41).

Densus 88 berhasil menembak mati Noordin M Top dalam penyergapan di rumah di Jebres, Solo, Jawa Tengah, 17 September 2009. Dalam penggerebakan tersebut juga berhasil menewaskan Bagus Budi Pranoto alias Urwah, pelaku pengeboman kedubes Australia, Susilo alias Abid, Ario Sudarso alias Aji, alias Suparjo Dwi Anggoro alias Dayat

alias Mistam Husamudin. Aji disebut-sebut sebagai kaki tangan Noordin M Top dan memiliki kemampuan merakit bom setara dengan Dr Azahari (<http://www.bbc.com/>).

Prestasi Densus 88 dalam aksi kontra terorisme tidak diragukan lagi, para teroris-teroris yang paling dicari se-Asia Tenggara maupun dunia berhasil ditemukan dan dieksekusi. Densus 88 berhasil menangkap total 840 teroris sejak peristiwa bom Bali I, 60 dari 840 teroris tertembak mati, sisanya berada di penjara dan sudah bebas. Dalam operasi penangkapan teroris, Densus 88 melakukan investigasi, penyamaran, dan pengamatan secara jelas dan terukur selama bertahun-tahun. Hal ini dilakukan agar warga sipil yang tidak terlibat tak ikut terkena dampaknya. Upaya ini juga untuk menghindari terjadinya pelanggaran HAM yang lebih besar (<http://nasional.tempo.co/>, 9 Maret 2013).

Regional Defense Combating Terrorism Fellowship Program (CTFP) dalam TNI

CTFP didirikan untuk membangun kemitraan dalam global war on terror melalui pelatihan non lethal, pendidikan dan pelatihan combating terrorism (CbT). CTFP memberikan pendidikan dan pelatihan kontra terorisme langsung kepada petugas militer tingkat pertengahan/senior internasional, kementerian pertahanan sipil, dan pejabat keamanan (United States Department of Defense, 2008:i).

CTFP untuk pasukan militer Indonesia, TNI, lebih khususnya melalui Komando Pasifik AS atau USPACOM (United States Pacific Command). Pelatihan-pelatihan CTFP untuk TNI yaitu: Comprehensive Security Responses to Terrorism, Military and Peacekeeping Operations, Boarding Officer Course, Military Intelligence Captains Career Course, International Counterterrorism Fellows Program, Intelligence in Combating Terrorism, Special Operations and Combating Terrorism Course, Port Security/Vulnerability, CTFP Continuing Education Event Continuing Education, Event Civil-Military Responses to Terrorism, Special Operations Program - Curriculum 699 (United States Department of Defense, 2008:28).

Meskipun AS terus memberikan pelatihan dari CTFP untuk TNI, peran TNI dalam penanganan aksi terorisme di Indonesia tidak memiliki banyak kesempatan untuk melakukan pemberantasan terorisme di Indonesia. Walaupun TNI memiliki kesatuan khusus anti teror sendiri, yaitu Unit 81 Den Gultor, Den Jaka dan Den Bravo. Hal ini karena pada UU no. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang berisikan wewenang-wewenang Densus 88 dalam penanggulangan terorisme.

Bisa disimpulkan bahwa program pelatihan-pelatihan militer yang diberikan oleh AS melalui CTFP untuk TNI, tidak memiliki dampak langsung bagi aksi terorisme di Indonesia. TNI sebagai pasukan keamanan Indonesia, berperan dalam tindakan preventif untuk mencegah aksi terorisme meningkat di Indonesia. Namun, peran TNI dalam menangani aksi teror masih berperan besar dalam teror yang memiliki arti luas (Muradi, 2012:102).

Kerjasama antara Indonesia dengan AS dalam CTFP untuk peran militer Indonesia dalam menangani aksi terorisme di Indonesia, tetap memberikan keuntungan bagi Indonesia. Dengan pelatihan *non-lethal* yang diberikan oleh AS bagi TNI, TNI mampu menjadi pasukan keamanan yang lebih baik lagi bagi menjaga bangsa Indonesia. Karena terorisme bukanlah suatu kejahatan yang mudah ditebak, sehingga persiapan bagi pasukan-pasukan keamanan negara Indonesia, bagi TNI maupun Polri diperlukan kemampuan yang matang untuk menghadapi ancaman dan gangguan yang mungkin akan terjadi.

Dalam penerapan implementasi kerjasama Indonesia dengan AS, tentu tak lepas dari faktor-faktor yang mendorong dan menghambat pelaksanaan kerjasama. Indonesia dan AS merupakan dua negara yang berbeda, baik secara geografis, budaya, ideologi, dan lain-lain.

Kondisi antara kedua negara tersebut akan mempengaruhi pelaksanaan kerjasama-kerjasama yang disepakati.

Faktor pendorong

Faktor pendorong dalam implementasi kerjasama Indonesia dengan AS yaitu; (1) riwayat hubungan baik antara Indonesia dan AS, Indonesia dan AS memiliki riwayat hubungan bilateral yang baik, hal tersebut juga mendorong akan terbentuknya kerjasama bagi kedua negara. Seperti pada kegiatan ekspor impor yang meningkat tiap tahunnya, begitu juga hubungan dagang dan investasi yang berkembang pesat. Bidang pariwisata juga merupakan salah satu pendorong kerjasama kedua negara, AS adalah salah satu negara yang menjadi wisatawan mancanegara terbanyak di Indonesia. Dalam bidang militer, hubungan bilateral Indonesia-AS dalam bidang keamanan terutama militer sudah tercipta sejak *Cold War*. Indonesia adalah salah satu aliansi AS dalam Gerakan Non Blok, (2) kesamaan misi dalam kontra terorisme, Indonesia dengan AS sama-sama mengalami peristiwa teror yang menjadi *turning point*. Misi *war on terror* oleh AS salah satunya dilakukan dengan mengajak negara-negara yang berpotensi menjadi target serangan terorisme untuk bekerjasama dalam kontra terorisme, salah satunya adalah Indonesia. Setelah terjadinya bom Bali 2002, Indonesia pun sepakat untuk bergabung dengan AS dalam *global war on terror*, (3) AS sepenuhnya mendukung demokrasi di Indonesia dan sebagai negara dengan umat Muslim terbesar di dunia, AS berusaha membantu Indonesia untuk membuktikan bahwa Islam dan demokrasi dapat bersatu di tengah meningkatnya Islam ekstrimis dan membantu Indonesia dalam memberantas terorisme. Indonesia yang dalam dekade terakhir terus menjadi target aksi teroris radikal, menjadi perhatian khusus bagi AS. Indonesia adalah salah satu mitra strategis geopolitik AS, yang akan membantu AS berkuasa di Asia dengan peran Indonesia di ASEAN.

Faktor penghambat

Faktor penghambat dalam implementasi kerjasama Indonesia dengan AS yaitu; (1) Polri dan TNI sama-sama memiliki peran dan tugas dalam memberantas terorisme di Indonesia. Namun, dalam riwayat pemberantasan terorisme paska bom Bali I, Polri lah yang memiliki peran besar dalam kontra terorisme. Hal tersebut juga didukung berdasarkan rujukan utama dalam pemberantasan terorisme di Indonesia yaitu pada UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Terorisme, yang menegaskan bahwa Polri dengan Densus 88 merupakan institusi utama dalam penanggulangan dan pemberantasan terorisme di Indonesia, TNI hanya menjadi pendukung dari proses tersebut. Sedangkan dalam rujukan hukum dari Pasal 7 UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI yang menjelaskan Operasi Militer Selain Perang yang diemban oleh TNI guna melegitimasi keterlibatan TNI dalam pemberantasan terorisme (Muradi, 2012:99-100), (2) Densus 88 yang bertugas pada sebagian besar penyergapan teroris, terancam oleh isu yang menyebutkan bahwa Densus 88 melakukan pelanggaran HAM dalam melaksanakan aksinya. Pada tahun 2013, Densus 88 terancam dibubarkan berdasarkan video yang tersebar di dunia maya, yang memperlihatkan penyergapan teroris oleh Densus 88 di Poso. Video tersebut diduga merupakan rekaman peristiwa 18 anggota Densus 88 dan Brimob kala menangkap 14 warga Kalora, Poso, Desember 2012. Jika pelanggaran hak asasi manusia benar dilakukan oleh Densus 88, hal tersebut dapat mempertanyakan tugas Densus 88 yang memberantas terorisme atas nama melindungi masyarakat dari ancaman aksi terorisme yang juga melanggar HAM. Pelanggaran HAM juga akan meragukan nilai-nilai liberalisme seperti demokrasi,

kebebasan dan hak asasi manusia yang dianut oleh AS dan Indonesia. Terutama bagi AS yang mendanai Densus 88 tersebut, nilai perlindungan kemanusiaan yang selalu dipromosikan oleh AS akan tercoreng dan merusak citra AS di dunia internasional.

Hal utama yang menjadi pokok dari penelitian ini adalah, apakah ada dampak bagi aksi terorisme di Indonesia setelah adanya kerjasama antara Indonesia dengan AS. Dilihat dari pelaksanaan penanggulangan terorisme melalui kedua program hasil kerjasama, kerjasama antara Indonesia-AS memberikan dampak yang positif pada aksi penanganan terorisme di Indonesia. Hasil dari kerjasama Indonesia-AS tidak bisa semata-mata dinilai hanya dari mempengaruhi terhadap tingkat aksi terorisme di Indonesia, namun kerjasama dengan AS memberikan pengaruh yang besar dalam kontra terorisme. Kerjasama tersebut dapat menghasilkan Densus 88 yang berprestasi dalam aksi kontra terorisme. Aksi penangkapan gembong teroris yang berbahaya menjadi tindakan preventif agar aksi terorisme di Indonesia tidak semakin berkembang. Pendidikan dan pelatihan dari AS untuk TNI dapat membantu TNI mempersiapkan diri menghadapi ancaman dan gangguan bagi Indonesia, terorisme adalah salah satunya.

Terorisme adalah ancaman *lethal* yang berbahaya, namun negara tidak dapat memprediksi kapan saja aksi terorisme akan terjadi, diperlukan kemampuan yang cukup untuk mempersiapkan apabila ancaman teroris datang kembali. Tertangkapnya para gembong teroris pun tidak memastikan terorisme akan serta-merta hilang, ideologi radikal teroris tetap dapat dengan mudah mempengaruhi dan mengilhami orang banyak untuk terus melakukan aksi teror. Proses penanganan teroris berupa kontra terorisme dengan memberantas kelompok teroris yang sudah ada dan tindakan preventif adalah hal yang menjadi inti utama dari proses kontra terorisme.

Indonesia-AS yang bekerjasama dalam kontra terorisme merupakan *milestone* yang baik bagi hubungan bilateral kedua negara. Hasil dari kerjasama dengan Indonesia merupakan *win win solution* untuk AS. AS dapat mensukseskan misi *global war on terror*, Indonesia dapat menanggulangi aksi terorisme di Indonesia, respek Indonesia pada AS akan membina hubungan yang baik di masa depan, dan kepentingan bersama kedua negara akan tercapai.

3. Kesimpulan

Hasil kerjasama Indonesia dengan Amerika Serikat dalam menangani aksi terorisme di Indonesia, terbentuk Densus 88 dari Polri yang sepenuhnya didanai dan diberi pelatihan melalui program Anti-Terrorism Assistance (ATA) Program serta pendidikan dan pelatihan militer kepada TNI melalui Regional Defense Combating Terrorism Fellowship Program (CTFP).

Program ATA merupakan program yang dinaungi oleh Bureau of Diplomatic Security dan CTFP dinaungi oleh Department of Defense. Program-program dari Pemerintah Amerika Serikat kepada Polri dan TNI tersebut merupakan bentuk kerjasama Indonesia dengan Amerika Serikat dengan tujuan pemberantasan terorisme di Indonesia. Indonesia yang merupakan salah satu aliansi Amerika Serikat dalam *global war on terror*, ikut serta dalam program-program kontra terorisme untuk bersama-sama memberantas terorisme di Indonesia maupun di dunia. Kerjasama tersebut diimplementasikan oleh pelaksanaan Densus 88 dan TNI yang diberikan pendidikan dan pelatihan militer untuk kontra terorisme di Indonesia.

Dalam pelaksanaan implementasi kerjasama Indonesia dengan Amerika Serikat, terdapat faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pada prosesnya. Faktor-faktor

tersebut mempengaruhi berlangsungnya kontra terorisme di Indonesia yang berdampak pada aksi terorisme di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis dari faktor-faktor pendukung dalam pelaksanaan kontra terorisme di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa: (1) Hubungan bilateral antara Indonesia dengan Amerika Serikat yang sudah lama terjalin dan cukup baik, mendukung adanya inisiatif Amerika Serikat untuk mengajak Indonesia bersama-sama memberantas aksi terorisme global maupun di Indonesia. Hal tersebut juga didukung dengan kesamaan misi antara Indonesia-Amerika Serikat yang ingin memberantas terorisme setelah sama-sama mengalami peristiwa aksi terorisme yang menjadi *turning point*, (2) Indonesia adalah salah satu mitra strategis Amerika Serikat di Asia. Indonesia terletak di kawasan strategis di Asia yang menjadi jalur perdagangan di Asia Tenggara dan peran penting Indonesia di ASEAN yang adalah salah satu *leading role* di ASEAN; dengan membina hubungan yang baik dan bekerjasama dengan Indonesia, Amerika Serikat dapat memperluas kekuasaannya di Asia. Indonesia sebagai negara demokrasi dengan mayoritas umat Muslim terbesar, diharapkan oleh Amerika Serikat menjadi *role model* untuk negara-negara Islam lainnya. Amerika Serikat ingin Indonesia yang di mana mayoritas umat Muslim dan demokrasi bersatu, diharapkan dengan memberantas aksi terorisme ekstrimis yang berideologi radikal tidak mencoreng citra Indonesia yang baik untuk dicontoh negara-negara Islam lainnya, terutama di Timur Tengah.

Faktor-faktor yang menghambat selama pelaksanaan tindakan kontra terorisme adalah ketidakseimbangan tugas kontra terorisme antara Polri dan TNI dan dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Densus 88 saat penyergapan teroris. Kedua hal tersebut dapat menghambat kinerja dalam misi pemberantasan terorisme di Indonesia. Analisis pada faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan implementasi kerjasama dapat disimpulkan bahwa: (1) Kasus ketidakseimbangan tugas antara Polri dan TNI terjadi karena Polri memiliki Densus 88 yang memiliki wewenang khusus dalam UU tentang terorisme, namun sebenarnya TNI sudah lama memiliki pasukan khusus kesatuan anti teror, yaitu Unit 81 Kopassus Den Gultor. Nampaknya yang banyak bertugas dalam kontra terorisme di Indonesia sejak bom Bali 2002 adalah Densus 88. Hal ini dapat memunculkan opini publik yang bertanya-tanya tentang peran Unit 81 TNI dalam kontra terorisme di Indonesia. Selain itu, terorisme merupakan permasalahan besar yang memerlukan *teamwork* yang kompak untuk diatasi, Polri dan TNI sebagai institusi keamanan di Indonesia sama-sama memiliki tanggungjawab dan tugas untuk menindak aksi terorisme, (2) Densus 88 diduga melakukan pelanggaran HAM saat melakukan penyergapan teroris di Poso. Hal tersebut mengakibatkan beberapa pihak ingin membubarkan Densus 88 karena tindakannya yang tidak manusiawi. Amerika Serikat adalah negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, Amerika Serikat dapat menghentikan bantuannya untuk Densus 88 seperti yang dilakukan Amerika Serikat di masa lampau yang melakukan embargo senjata pada TNI karena pelanggaran HAM. Adanya pelanggaran HAM oleh Densus 88 juga dapat menegasi tujuan utama Densus 88 dalam kontra terorisme yang bertujuan untuk melindungi pelanggaran HAM yang dilakukan teroris.

Implementasi kerjasama antara Indonesia dengan Amerika Serikat yang dilaksanakan memberikan hasil yang positif terhadap kontra terorisme di Indonesia. Densus 88 sebagai garda terdepan kontra terorisme mendapatkan pelatihan dari FBI dalam meningkatkan kemampuan khusus berupa aksi pelacakan dan penyergapan teroris. Gembong teroris yang berbahaya seperti Noordin M Top dan Dr Azahari dapat ditangkap dan dieksekusi oleh Densus 88 meskipun perlu waktu yang cukup lama karena kegesitan teroris yang tidak mudah untuk ditangkap. Dalam program CTFP, meskipun tidak dapat dinilai langsung

kesertaan CTFP dalam TNI untuk tindakan kontra terorisme, pendidikan dan pelatihan dari CTFP untuk TNI merupakan investasi yang bagus untuk mempersiapkan pasukan militer Indonesia yang baik demi menjaga keamanan Indonesia dari ancaman dan gangguan di masa depan, termasuk dari aksi terorisme.

Meski aksi terorisme di Indonesia tidak semata-mata berkurang setelah adanya kerjasama antara Indonesia dengan Amerika Serikat untuk penanganan aksi terorisme, adanya pasukan khusus anti teror Densus 88 yang dibentuk Polri bersama Amerika Serikat sangat membantu untuk mengatasi aksi terorisme di Indonesia. Keberhasilan penangkapan para teroris terutama aktor-aktor utamanya, menjadi tindakan preventif untuk peningkatan aksi terorisme di Indonesia. CTFP dalam TNI juga dapat mendukung pelaksanaan kontra terorisme dengan pendampingan untuk Polri dan meningkatkan perlindungan dari ancaman dan gangguan dan menjaga keutuhan Indonesia sebagai NKRI.

Daftar Pustaka

- Accused Asian terror leader: Expect more blood. 2007. Dalam http://edition.cnn.com/2007/WORLD/asiapcf/06/25/abu.dujana/index.html?eref=rss_world
- Dr Azahari Ledakkan Diri. 2005. Dalam <http://www.suaramerdeka.com/harian/0511/10/nas01.htm>
- Dua Anak Buah Noordin Tewas. 2006. Dalam <http://www.suaramerdeka.com/harian/0604/30/nas01.htm>
- Muradi. (2012). *Densus 88 AT: Konflik, Teror, dan Politik*. Bandung: Dian Cipta.
- Noordin Top Dipastikan Tewas. Dalam http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2010/02/100201_noordin.shtml
- Peristiwa yang Melambungkan Nama Densus 88. 2013. Dalam <http://nasional.tempo.co/read/news/2013/03/09/078466041/peristiwa-yang-melambungkan-nama-densus-88>
- Regional Defense Combating Terrorism Fellowship Program. (2008). *Regional Defense Combating Terrorism Fellowship Program. Department of Defense*.
- State Department. (2004). *Patterns of Global Terrorism 2003. Office of the Coordinator for Counterterrorism, U.S. Department of State*.
- U.S.-Indonesia relations. 2005. Dalam <http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CHRG-109shrg27909/html/CHRG-109shrg27909.htm>